



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhany Sukma

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

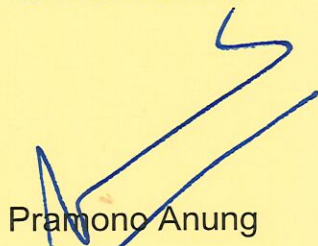
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

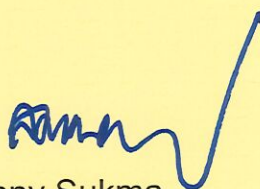
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : Dhany Sukma
NIP : 197403091993111001
Jabatan : Inspektur
Unit Kerja : Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Manajemen Risiko	Sistem Perencanaan Tahunan	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. DEFINISI : Indeks Manajemen Risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. METODE PENGUKURAN : Parameter penilaian Indeks Manajemen Risiko dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan (bobot 40%), Kapabilitas (bobot 30% terdiri dari Kepemimpinan 5%, Kebijakan Manajemen Risiko 5%, Sumber Daya Manusia 5%, Kemitraan 2,5%, dan Proses Manajemen Risiko 12,5%) , dan Hasil (bobot 30% terdiri dari Aktivitas Penanganan Risiko 18,75% dan Outcome berupa kontribusi penerapan manajemen risiko terhadap tujuan	N/A	N/A	N/A	3,53	3,53	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	25	25	25	25	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				organisasi 11,25%)	N/A	N/A	N/A	3,53	3,53	Nilai
2	Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Sistem Perencanaan Tahunan	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. DEFINISI : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. METODE PENGUKURAN : Parameter Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dibagi dalam tiga pilar yaitu : Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (bobot 48% terdiri dari Kebijakan Antikorupsi 9,6%, Seperangkat Sistem Antikorupsi 7,2%, Dukungan Sumber Daya 7,2%, Power (Kuasa dan Wewenang) 14,4%, dan Pembelajaran Antikorupsi 9,6%), Penerapan Strategi Pencegahan (bobot 36% terdiri dari Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi 9%, Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel 3,6%, Kepemimpinan Etis 9%, Integritas Organisasional 7,2%, dan Iklim Etis Prinsip 7,2%), dan Penanganan Kejadian Korupsi (bobot 16% terdiri dari Investigasi 8% dan Tindakan Korektif 8%)	N/A	N/A	N/A	3,53	3,53	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,53	RA1. Menyusun Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	KK1.1. Tersusunnya Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	T/O1.1.1. Matriks rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	1 Dokumen	TW I
				RA2. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	KK2.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	T/O2.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	1 Laporan	TW II
				RA3. Melaksanakan Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026	KK3.1. Terlaksananya Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026	T/O3.1.1. Laporan Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026	1 Laporan	TW II
				RA4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah melalui pendampingan penyusunan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA) untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	KK4.1. Terlaksananya Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA) untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	T/O4.1.1. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment/FRA) untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	TW III
				RA5. Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Tahun 2026	KK5.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Tahun 2026	T/O5.1.1. Hasil Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Tahun 2026	1 Laporan	TW III
				RA6. Melaksanakan Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026	KK6.1. Terlaksananya Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko	T/O6.1.1. Laporan Reviu atas Manajemen Risiko Fraud untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko Fraud Tahun 2026	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					Fraud Tahun 2026			
2	Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,53	RA1. Menyusun Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	KK1.1. Tersusunnya Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	T/O1.1.1. Matriks rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	1 Dokumen	TW I
				RA2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah melalui pendampingan penyusunan dan evaluasi risk register sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	KK2.1. Terlaksananya Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan dan evaluasi risk register sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	T/O2.1.1. Laporan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan dan evaluasi risk register sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dalam rangka penguatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	TW II
				RA3. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	KK3.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	T/O3.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2025	1 Laporan	TW II
				RA4. Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri MRI Tahun 2026	KK4.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri MRI Tahun 2026	T/O4.1.1. Hasil Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri MRI Tahun 2026	1 Laporan	TW III
				RA5. Melaksanakan Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2026	KK5.1. Terlaksananya Reviu atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O5.1.1. Laporan Reviu atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Laporan	TW IV
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem movev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem movev Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem movev Bappeda	1 Data	TW I
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 Data	TW I
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					penyerapan anggaran sesuai dengan target			
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 Persentase	TW IV
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					hasil pemeriksaan BPK			
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
 Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					hasil pemeriksaan BPK			
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dhany Sukma
NIP 197403091993111001